

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberitaan mengenai buruh atau pekerja tidak pernah berhenti menghiiasi media kita. Belum selesai masalah pertama, muncul masalah kedua, ketiga, dan seterusnya yang tidak kunjung menemukan titik temu. Permasalahan yang melingkupi buruh atau pekerja tersebut mulai dari jumlah upah, sistem kontrak, *outsourcing*, PHK dan masih banyak masalah lain yang kemudian memunculkan marginalisasi buruh. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan ketidakberpihakan pemerintah kepada buruh atau pekerja.

Pemerintah yang diharapkan menjadi dewa penyelamat, justru terlalu banyak menyampaikan retorikatan pada solusi, “minder” pada pengusaha (pemilik modal) dan buruh dijadikan komoditas politik. Ironisnya, di satu sisi buruh selalu dimarginalkan, tetapi di sisi lain buruhlah yang memiliki kontribusi untuk menopang perekonomian negara ini. Padahal buruh itu besar sekali peranannya bagi sebuah negara, selain sebagai penggerak ekonomi, tapi juga sebagai pelaku utama pembangun peradaban Muaddib, (2009:*Thesis Skripsi*). Jumlahnya yang besar, maka buruh juga menjadi salahsatu kekuatan utama dalam menentukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kontribusi buruh yang demikian besar ternyata tidak mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

Menurut UU No 22 tahun 1957 (tentang penyelesaian perselisihan perburuhan) mendefinisikan buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Menurut ILO sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, 2011. Buruh adalah seorang yang bekerja pada orang lain atau badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan kata lain semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemilik alat produksi maka bisa dikatakan sebagai buruh atau pekerja.

Konsepsi ini juga sejalan dengan pemikiran Teori Marx, (2004:193) tentang borjuis dan proletar, pada hakikatnya didunia ini hanya ada 2 kelas yaitu borjuis dan proletas, borjuis adalah pemilik alat produksi dan proletar adalah orang yang tidak memiliki alat produksi .

Sejarah perburuhan di Negara manapun, termasuk di Indonesia, boleh dikatakan tidak pernah menggembirakan. Kedudukan dan nasib para buruh atau pekerja selalu tragis dan menyedihkan. Hal ini bukan saja karena tenaga dan pikiran mereka yang harus di curahkan untuk membantu tuan atau majikannya, karena nasib mereka juga di pertaruhkan. Sejak era kemerdekaan hingga sekarang, nasib kaum buruh di negeri ini tetap saja memprihatinkan. Mereka selalu menjadi manusia-manusia pinggiran yang tak pernah jelas masa depannya. Lahirnya serikat buruh atau pekerja, baik pada era kemerdekaan, era ordebaru, maupun era reformasi, yang diharapkan akan mampu memperjuangkan nasib kaum buruh atau pekerja belum terlihat hasilnya. Kaum buruh atau pekerja tetap menjadi pihak yang termarginalkan, yang hidup dengan segala keterbatasannya.

Menurut Abdul Jalil, (2008: 01) Persoalan perburuhan pada dasarnya memang merupakan salah satu agenda sosial, politik dan ekonomi yang cukup krusial di Negara-negara modern saat ini sebab tidak hanya menyangkut hubungan antara para buruh dengan majikan, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah Negara dan sekaligus sistem politiknya. ekonomi-politik suatu Negara akan sangat menentukan corak dan warna dari suatu system perburuhan yang diberlakukan. Persoalan perburuhan memang sangat di tentukan oleh sistem ekonomi dunia, khususnya sistem ekonomi kapitalis.

Dalam sistem kapitalisme, kaum buruh cenderung di eksploitasi. Mereka diperas tenaganya untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai “nilai lebih”. Sayangnya, nilai lebih itu sendiri tidak kembali kepada buruh, tetapi kembali kepada pihak pengusaha (kaum kapitalis). Dalam hal ini, buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannya, dan upah tersebut sama sekali tidak merepresentasikan pembagian keuntungan dari nilai lebih yang diperoleh pihak perusahaan menurut Paul Baran dan Sweezy: (1966:194).

Dalam hubungan industrial yang menganut sistem kapitalisme ini, kaum buruh sering kali di rancang sebagai bagian dari sistem produksi dengan metafora mesin. Upah yang di berikan kepada kaum buruh dianggap sebagai biaya yang harus disesuaikan dengan produktivitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai upah buruh yang rendah tersebut di nilai oleh pengusaha sebagai hal yang baik karena akan mendatangkan hasil yang maksimal. Menurut

Bhaverman, (1974:195) agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan antara serikat buruh dan pengusaha lebih baik untuk melakukan perjanjian dan perundingan.

Menurut Suprihanto, (2002:187), Perundingan Kolektif adalah suatu proses dimana para wakil dua kelompok (pihak karyawan yang diwakili oleh serikat buruh dan pihak manajemen) bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak diwaktu yang akan datang. Hubungan Industrial menyangkut hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah serta masalah-masalah yang melingkupi hubungan tersebut, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Secara umum, aktivisme buruh atau pekerja bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok buruh untuk menentang kebijakan industrial dan perlakuan yang tidak adil serta melindungi dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup (Rutten, 2000: 92-93).

Aktivisme buruh atau pekerja bisa dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlawanan yang terbuka, terorganisasi bahkan sering berbentuk perlawanan skala besar dan bentuk perlawanan tersembunyi atau sehari-hari. Pemogokan, unjuk rasa, pawai, dan bentuk aksi perlawanan terbuka lainnya merupakan bentuk aktivisme buruh atau pekerja yang mendominasi pemberitaan media massa. Jumlah massa yang besar dan aksi-aksi perlawanan agresif memang lebih mudah dilihat dan lebih menarik untuk dijadikan bahan pemberitaan dibandingkan dengan bentuk perlawanan tersembunyi atau perlawanan sehari-hari. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan diatas baik secara tersembunyi dan terbuka muncul dan terjadi karena adanya konflik antara buruh dan majikan. Karena

resiko dari konflik atau masalah yang dipendam akan mengakibatkan sebuah tindakan yang bisa memutuskan hubungan antara kedua belah pihak.

Masalah ini terjadi pada buruh atau pekerja PT. INTERBAT Farmasi karena Serikat buruh menuntut segera Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) di tandatangani oleh gubernur, padahal Kota Pasuruan sudah ditandatangani oleh Bupati dan disetujui oleh Gubernur, tetapi sampai sekarang gubernur belum menandatangani surat keputusan untuk wilayah Sidoarjo. Padahal sudah jelas tertulis Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 tahun 1997 Pasal 1 memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang upah minimum. Upah minimum sektoral merupakan upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu.

Fenomena ini kemudian melahirkan persepsi di pihak buruh atau pekerja bahwa perusahaan adalah “mesin pencetak uang” dengan bahan bakar “keringat manusia”. Hubungan industrial seperti itulah yang berjalan di hampir seluruh Negara di dunia, khususnya yang menganut system ekonomi kapitalis, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di negeri ini persoalan pengangguran tak pernah dapat diatasi, dan bahkan cenderung terus bertambah, secara politik, posisi kaum buruh juga cenderung semakin lemah. Dengan dihantui oleh perasaan khawatir akan diberhentikan, yang kemudian berimplikasi pada nasib keluarga mereka, para buruh dipaksa untuk menerima nasib sebagaimana adanya, sebagai akibatnya, kaum buruh tetap menjadi kelompok yang termarginalkan dan tersisihkan, tanpa memiliki banyak harapan bagi kehidupan masa depan yang lebih baik.

Fenomena yang terjadi pada buruh pabrik di PT. INTERBAT Farmasi Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1, Buduran – Sidoarjo. Memunculkan gejala-gejala semacam itu yang mengakibatkan banyaknya demo yang dilakukan oleh buruh untuk mendapatkan keadilan, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Perlawanan Serikat Buruh terhadap Hubungan Industrial di Perusahaan Interbat Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1, Buduran – Sidoarjo

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana proses perlawanan serikat buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial (studi kasus di PT INTERBAT Farmasi Kec Buduran – Sidoarjo)?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan serikat buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial (studi kasus di PT INTERBAT Farmasi Kec Buduran – Sidoarjo)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Perlawanan Serikat Buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial (studi kasus di PT INTERBAT Farmasi Kec Buduran – Sidoarjo) dan Bentuk-bentuk Perlawanan Serikat Buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial (studi kasus di PT INTERBAT Farmasi Kec Buduran – Sidoarjo).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua macam manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk studi-studi lanjutan mengenai Perlawanan Serikat Buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial (studi kasus di PT INTERBAT Farmasi Kec Buduran – Sidoarjo). Selain itu, dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian berikutnya terutama berkaitan dengan perlawanan serikat buruh. Manfaat lain yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu kajian ilmiah dan menambah pengetahuan bagi pembaca,

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa dalam hal Pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang sosial sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai bahan referensi tambahan bagi mahasiswa ketika mengadakan penelitian tentang buruh atau pekerja.
3. Sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang perlawanan serikat buruh terhadap tuntutan upah minimum sektoral kota dalam kerangka hubungan industrial.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan menemukan dan mendeskripsikan mengenai perlawanan yang dilakukan oleh Serikat Buruh di PT. INTERBAT Farmasi Jl.

H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Konsep perlawanan yang dipakai oleh Serikat Buruh dalam penelitian ini adalah perlawanan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perlawanan yang dimaksud adalah sebuah upaya melakukan proses, cara, perbuatan melawan untuk menyerukan keadilan terhadap suatu kebijakan yang dirilis atau diterbitkan oleh perusahaan (Rutten,2000).

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Grendi Hendrastomo, (2010:*Paper Skripsi*), tentang perlawanan memperjuangkan kesejahteraan buruh atau pekerja yang mengatakan bahwa permasalahan yang melingkupi buruh atau pekerja tersebut mulai dari jumlah upah buruh, sistem kontrak, *outsourcing*, PHK dan masih banyak masalah lain yang kemudian memunculkan marginalisasi buruh atau pekerja. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan ketidak berpihakan pemerintah kepada buruh atau pekerja. Oleh karena itu buruh atau pekerja menuntut keadilan dengan cara melakukan demo, pawai, atau melakukan perlawanan secara tersembunyi dalam sehari-hari.

Tinjauan kasus marsinah sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, (2011:hlm86) juga cukup menarik perhatian seluruh bangsa Indonesia. Upaya mogok kerja yang sehat telah menyeret Marsinah sebagai korban pembunuhan. Kasus ini telah memberi pelajaran untuk memerhatikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Surabaya, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 08 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan

Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kasus Marsinah secara kasat mata bukan perkara criminal biasa. Kasus ini berlatar belakang unjuk rasa di Pabrik arloji (PT CPS) tempat bekerja Marsinah yang menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja. Sebelum jasad Marsinah ditemukan tergolek mengenaskan almarhum tampil gigik memperjuangkan 13 rekan sekerjanya yang di-PHK di Kantor Kodim Sidoarjo seusai unjuk rasa. Kisahnya kian dramatis di mata publik, ketika pengusutan kasus itu harus ditangani dari pusat, yang disusul dengan menghilangnya pemilik dan staf manajemen PT CPS dan kemudian diseret ke pengadilan.. sampai disitu motif pembunuhan ganti haluan, Yakni Marsinah dibunuh karena mengancam membocorkan kegiatan ilegal.motoif ini entah dari mana hulunya karena seperti dinyatakan polisi ketika PT CPS digrebek tidak terbukti pemalsuan produk. Justru perusahaan ini dipercaya mengerjakan order dari beberapa instansi. Penyelesaian Kasus Marsinah semestinya dimulai dengan memahami konteks ekonomi-politik di sekitar dunia perburuhan. Tampaknya, kasus Marsinah diciutkan sebagai peristiwa yang lepas dari konteks aksi mogok sebelumnya.

Suatu pemogokan buruh menuntut kesejahteraan yang lebih baik, dalam dalam jangka panjang akan mengganggu basis materil industry nasional. Ketika terjadi mogok kerja atau unjuk rasa buruh di Perusahaan, lazimnya pihak manajemen mengundang aparat keamanan dan Depnaker untuk menertibkannya. Jadi bisa dimengerti, pemogokan buruh yang tidak terkendali dalam jangka panjang dapat berakibat pada terganggunya koordinasi dan kepentingan ekonomi

aparatur pengendalian buruh. Maka wajar saja, setiap aksi buruh menuntut perbaikan kesejahteraan selalu dihadapi dengan keras.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh posisi buruh atau pekerja selalu dimarginalkan dan adanya ketidakharmonisan hubungan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha hal inilah yang menyebabkan terjadinya aksi terbuka atau unjuk rasa. Biasanya buruh atau pekerja melakukan aksi unjuk rasa disebabkan oleh adanya tuntutan yang diajukan buruh atau pekerja yang tidak ditanggapi perusahaan dengan berbagai alasan dan perusahaan juga memberikan peraturan yang mana buruh kadang tidak menyetujui dengan peraturan tersebut.

Setiap buruh atau pekerja wajib berorganisasi tetapi PT INTERBAT Farmasi ini tidak memberi kebebasan sepenuhnya berserikat kepada buruh kontrak dan buruh *outsourcing* dalam melakukan aksi demo inilah yang memperparah buruh tidak bisa menyuarakan haknya yang mana buruh merasa terkekang dan selalu menganut dengan peraturan perusahaan. Perbaikan kesejahteraan tampaknya akan terus menjadi tuntutan para buruh atau pekerja, sebenarnya kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan menjadi motivasi utama untuk bekerja lebih baik mengingat bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar para pekerja dapat termotivasi untuk bekerja dengan baik.

Dari perlawanan yang dilakukan buruh atau pekerja lebih merujuk pada posisi dari pihak yang menjadi lawan. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi lawan buruh atau pekerja yaitu manajemen perusahaan. Buruh atau pekerja menuntut upah tetapi dalam perlawanan ini Buruh atau pekerja Tetap yang diberi

kebebasan sepenuhnya dari perusahaan dalam melakukan aksi demo, buruh kontrak dan buruh *outsourcing* tidak berani karena takut mendapat dispensasi dan akan dikeluarkan dari perusahaan. Selain itu, munculnya perlawanan yang dilakukan buruh atau pekerja merupakan sebagian besar hasil dari inisiatif sendiri dan didukung oleh organisasi serikat buruh atau pekerja dalam suasana reformasi dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia pada tahun 1997.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Konflik Lewis Coser

Menurut Lewis A. Coser sebagaimana yang dikutip oleh Margaret M. Poloma, (1992: hlm 113-117) mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang, permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, Fungsionalitas konflik. Coser mengutip hasil pengamatan George Simmel yang menunjukkan bahwa konflik mungkin positif sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan.

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terlihat betapa kompleks dan rumitnya persoalan yang ada di dalamnya dan hal itu terus bermunculan dan tak kunjung ada penyelesaian. Kaum buruh berada di dalam kondisi gamang. Pada satu sisi mereka terus hidup dengan kesadaran tradisional, namun di sisi lain mereka juga dihadapkan secara langsung dengan praktik-praktik diskursif dan hegemonisasi kapital. Karuan saja, tingginya tinggi pengangguran, sedikitnya ketersediaan lapangan kerja, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, masalah upah kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, buruh kontrak, menjadi

persoalan yang semakin kusut. Oleh karena itu, kaum buruh membentuk gerakan serikat buruh atau pekerja.

Kaum buruh di Indonesia memang kini memiliki kebebasan berserikat dengan kondisi yang jauh lebih baik, tetapi konflik relasi perburuhan-industrial juga didapati meningkat. Di Indonesia sendiri upah buruh hanya sepertiga dari buruh thailand. Masalah upah dan kesejahteraan buruh tidak lain menjadi pemicu utama konflik.

Banks, (1974:hlm53) mengemukakan teori “determinist dan teori “voluntarist yang membahas serikat pekerja atau buruh sebagai perangkat perubahan sosial. Konsep “determinist” menyatakan bahwa aktivitas atau kegiatan tidak lebih dari pada suatu respons atau tanggapan terhadap masalah mendasar dalam bidang ekonomi , politik, dan sosial yang terjadi di luar tubuh organisasi serikat pekerja atau buruh. Konsep “Voluntarist” mengatakan bahwa sikap militan serikat pekerja atau buruh adalah faktor penyebab meningkatnya kesejahteraan ekonomi kaum buruh.

Bila dianalisa teori konflik dari Coser, bahwa teori yang ia kemukakan berbeda dengan analisis banyak kaum fungsionalis, yang memandang bahwa konflik itu merupakan disfungsional (merintang) bagi suatu kelompok. Sedangkan Coser memandang kondisi-kondisi di mana secara positif, konflik bisa mengakibatkan terjadinya solidaritas terhadap buruh. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan.

Hal ini terlihat dalam PT. INTERBAT Farmasi Lewis Coser mengatakan bahwa konflik bisa mengakibatkan terjadinya solidaritas terhadap buruh. Konflik sebagai proses sosial yang mana kelompok dan batas-batasnya berbentuk dan dipertahankan. Hal ini terbukti di PT. INTERBAT Farmasi yang mana serikat buruh melakukan bentuk perlawanan. Dengan adanya aksi perlawanan buruh bisa menuntut haknya dan tidak merubah struktur yang ada

Menurut Rutten, 2000 Perlawanan merupakan daya tolak atau resistensi. Resistensi buruh adalah adanya "perlawanan" (baik diam-diam atau terang-terangan) terhadap suatu kebijakan yang dirilis/diterbitkan suatu pihak perusahaan. Perlawanan tidak akan muncul, apabila suatu kebijakan akan diterapkan atau disampaikan. Secara umum, aktivisme buruh bisa didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok buruh untuk menentang kebijakan industrial dan perlakuan yang tidak adil serta melindungi dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup. Aktivisme buruh bisa dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlawanan yang terbuka, terorganisasi bahkan sering berbentuk perlawanan skala besar dan bentuk perlawanan tersembunyi atau sehari-hari.

Aksi terbuka buruh atau pekerja akan lebih mudah terlibat dalam bentuk aksi yang tidak akan mengancam sumber penghasilan. Dengan demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain- lain merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat sebagaimana yang dikutip oleh Tarrow, 1994. Perlawanan ini dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup

sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan anggota lainnya Scott, 1993. Selain itu, keterlibatan dalam aksi-aksi terbuka memerlukan dana dan tenaga yang harus diakomodasi oleh keluarga buruh. Kondisi ini dapat membatasi keterlibatan buruh dalam aktivisme perburuhan Rutten, 2000. Dalam pengertian ini, aktivisme perburuhan terkait dengan kebutuhan untuk bertahan hidup dan perlu dipahami oleh para aktivis ketika melakukan pengorganisasian buruh. Menurut Slamet, 2013 Pada tanggal 1 Mei di peringati Hari Buruh sedunia mendatang dianggap sebagai saat yang tepat untuk kembali mengirimkan sinyal perlawanan ke pemerintah pusat.

Aksi tersembunyi Istilah perlawanan tersembunyi memunculkan debat yang khususnya terkait dengan masalah intention dan consequence. James C. Scott 1986 dalam *Everday Forms of Resistance* menekankan pentingnya intention (maksud), namun menilai maksud tidaklah mudah. Konsep perlawanan tersembunyi, yakni seorang buruh baik secara sadar atau tidak, mencoba untuk mengurangi klaim pihak lain atas dirinya atau untuk mencurangi sistem. Aksi ini banyak ditemukan dan mendominasi aktivitas sehari-hari buruh di pabrik. Misalnya, upah minim mendorong buruh untuk melakukan kegiatan ekonomi tambahan di tempat kerja, seperti berjualan makanan ringan yang dilarang oleh perusahaan. Menolak makan di kantin dan memilih ngobrol atau tiduran saat istirahat menjadi keseharian buruh.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap makanan kantin yang dianggap kurang layak. Bentuk kekesalan buruh terhadap manajemen juga kerap

disalurkan melalui kerja yang terkesan asal-asalan. Aksi-aksi tersembunyi semacam ini memang tidak berdampak besar karena dilakukan secara perseorangan, tetapi cukup efektif dalam menyalurkan ketidakpuasan apalagi ketika saluran formal dan serikat buruh dianggap kurang berhasil menjalankan perannya.

Mengenai bentuk-bentuk perlawanan yang muncul di PT. INTERBAT Farmasi. Buruh atau pekerja lebih menggunakan aksi terbuka karena aksi terbuka lebih di respon oleh perusahaan adapun aksi tersembunyi lebih digunakan buruh atau pekerja yang tidak melakukan orasi atau aksi demo karena aksi demo lebih dari perwakilan dari serikat buruh.

1.5.2.2 Serikat Buruh

Buruh dapat diartikan sebagai orang yang bekerja di bawah perintah orang lain, dengan menerima upah karena dia melakukan pekerjaan diperusahaan. Sebagai pengganti istilah buruh kini digunakan istilah pekerja. Penggantian ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan. Disamping istilah pekerja masih terdapat istilah-istilah lain seperti pegawai dan karyawan. Istilah pegawai lebih banyak dan sering digunakan untuk orang yang bekerja bagi pemerintah. Sehingga mereka disebut Pegawai Negeri, karyawan berarti setiap orang yang melakukan karya. Istilah ini lebih bersifat umum, sehingga dalam masyarakat dikenal istilah karyawan pengusaha, karyawan angkatan bersenjata dan sebagainya.

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan definisi tentang serikat buruh, yaitu :

“ Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Sedangkan definisi dari kata buruh itu sendiri menurut Undang-Undang No. 13/2003 adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya, semua yang bekerja di (baik diperusahaan/luar perusahaan) dan menerima upah atau imbalan adalah buruh. Serta Buruh dapat diartikan merupakan pekerja yang pada umumnya menggunakan tenaga sebagai alat untuk mendapatkan upah atau gaji sebagai penghasilan. Dalam kehidupan sehari-hari, buruh dapat juga dibedakan sebagai buruh halus dan buruh kasar. Buruh halus biasanya bekerja di kantor yang disebut dengan pegawai atau karyawan sedangkan buruh kasar adalah pekerja yang mengandalkan tenaga fisik dan sering juga disebut dalam konotasi kuli.

De Cenzo dan Robbins, (1999: hlm482) mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi serikat buruh dilakukan melalui *collective bargaining* dalam upaya meningkatkan dan melindungi kepentingan pekerja. Dalam proses *bargaining*, serikat buruh atau pekerja mewakili anggotanya dan bukan sebagai pribadi atau pihak ketiga yang hanya bertugas melakukan sosialisasi berbagai kebijakan perusahaan. Inilah makna sesungguhnya dari serikat buruh sebagai sebuah *interest group dan preassure group*. Dalam beberapa kasus, serikat buruh yang dibentuk pada sebuah perusahaan bertindak sebagai corong perusahaan untuk menyampaikan berbagai kebijakan kepada kaum buruh tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, keberadaan serikat buruh di perusahaan memberi manfaat bagi pihak pekerja dan juga manajemen. Bagi pekerja, keberadaan serikat buruh

dapat dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi kerja. Selain itu juga akan lebih mendekatkan jarak antara manajemen dan pekerja karena adanya perwakilan serikat buruh dalam manajemen.

Werther dan Davis, (1996:hlm527) mengatakan bahwa dengan semakin berkembangnya organisasi, pekerja kehilangan kontak secara langsung dengan majikan dan dengan demikian serikat buruh diperlukan untuk membantu pekerja mempengaruhi keputusan-keputusan ketenagakerjaan. Melalui serikat buruh, pekerja akan lebih mampu melakukan kontrol terhadap pekerjaannya dan lingkungan kerjanya. Kemudian, pada saat majikan mencoba untuk memotong upah, pekerja mempercayakan kepada serikat buruh untuk menentang tindakan tersebut.

1.5.2.3 Upah Minimum

Upah merupakan suatu penerimaan kerja yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja atau buruh dan dinyatakan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Penetapan upah sebagaimana yang dikutip oleh Syaafi Syamsuddin, (2006: *Informasi Hukum*) dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan.

Upah minimum regional sari tahun ke tahun selalu naik dikarenakan setiap awal tahun pekerja atau buruh melakukan perlawanan terbuka untuk mencapai kebutuhan hidup layak. Dibawah ini merupakan daftar Upah minimum regional kota Sidoarjo:

Tabel 1.1

Upah Minimum Regional	
2007	Rp 745.500, 00
2008	Rp 802.000, 00
2009	Rp 955.000, 00
2010	Rp 1.005.000, 00
2011	Rp 1.107.000, 00
2012	Rp 1.252.000, 00
2013	Rp 1.720.000, 00

Sumber data: Internet (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:2011)

Upah minimum merupakan sebuah keputusan pemerintah, bukan hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Dalam upah minimum juga

terkandung hak hidup buruh yang ditetapkan pemerintah. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja terhadap upah minimum Pasal 1. Upah Minimum Sektoral merupakan upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu. Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten atau Kota. Untuk pendataan saat ini upah minimum sektoral ditetapkan di beberapa Kabupaten atau Kota atas dasar kesepakatan antara organisasi pekerja dan organisasi sektoral pekerja. Dari hasil pendataan buruh atau pekerja meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera turun jabatan, karena tidak segera merekomendasi surat keputusan tentang upah minimum sektoral. Buruh atau pekerja menuntut Gubernur untuk menetapkan upah sektoral yang sudah ditandatangani Bupati. Ada satu Kabupaten atau kota yang sudah ditandatangani oleh Gubernur yaitu Kabupaten Pasuruan. Sehingga buruh atau pekerja kabupaten Sidoarjo selalu menuntut dan melakukan aksi terbuka untuk mendapatkan haknya.

Ekonomi merupakan hal yang paling terpenting di dalam kehidupan manusia ke arah kemakmuran. Masalah upah, buruh atau pekerja terus bermasalah. ratusan buruh menggelar unjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Timur (Jatim) melaksanakan upah sektoral Kabupaten atau Kota sebesar 10 hingga 30 persen, Koran Memo:27 Desember 2012.

1.5.2.4 Hubungan Industrial

Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada didalam perusahaan. Hubungan

ini mencakup yang lebih luas, yakni: menyangkut hubungan antara pekerja dan pengusaha, serta masalah-masalah yang melingkupi hubungan tersebut, seperti: ekonomi, sosial dan politik (Suprihanto:2). Dalam penelitian ini mencakup yang lebih sempit seperti ekonomi dan sosial..

Hubungan Industrial ternyata berkaitan dengan semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja di suatu perusahaan tanpa mempertimbangkan gender, keanggotaan dalam serikat buruh atau pekerja, dan jenis pekerjaan. Hubungan Industrial juga seharusnya tidak dilihat hanya dari persyaratan peraturan kerja organisasi yang sederhana, tetapi juga harus ditinjau dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas (dipandang secara komprehensif).

Memang tidak mudah membangun kondisi hubungan industrial yang benar-benar ideal menurut ukuran masing-masing pihak, namun disisi lain bukan sesuatu yang mustahil untuk mencari pendekatan-pendekatan yang adil terhadap semua permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan diskusi secara kesinambungan guna mengatasi semua yang muncul baik sekarang maupun untuk masa-masa yang akan datang. Atas dasar pertimbangan bahwa manajemen dan serikat buruh atau pekerja merupakan intisel atau elemen yang paling pokok dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hubungan Industrial harus dipadukan dengan bidang sosial, politik dan ekonomi, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam Undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 pasal 16 disebutkan bahwa pengertian dari Hubungan Industrial adalah sistem Hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang

dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh atau pekerja dan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang 1945.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh dan utuh. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan Metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh responden dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden menurut Moleong, (2005: hlm03).

Penelitian kualitatif lapangan ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu . dengan mengambil kasus perlawanan yang dilakukan oleh serikat buruh atau pekerja di PT. INTERBAT Farmasi terhadap tuntutan Upah Minimum Sektoral Kota. Menurut Surakhmad (1974), bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Orang-orang yang diteliti terdiri atas satu unit atau satu kesatuan yang di pandang sebagai kasus karena sifatnya mendalam, maka melalui studi kasus umumnya dihasilkan gambaran yang longitudinal yaitu hasil pengumpulan dan analisa kasus dalam suatu jangka waktu tertentu dimana segala aspek dalam kasus tersebut mendapat perhatian sepenuhnya dari peneliti.

Secara ringkasnya yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu). Biasanya pendekatan triangulasi juga digunakan untuk menguji validitas data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu disuatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu.

1.6.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber data yaitu:

1.6.2.1 Data Primer

Menurut S. Nasution, Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan. Ada tiga metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan metode observasi dan metode wawancara serta catatan lapangan.

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung mengenai aspek perlawanan dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan serikat buruh atau pekerja.

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak yang dianggap ikut serta dalam aksi perlawanan terbuka ataupun perlawanan tersembunyi. Mulai dari buruh tetap, buruh kontrak maupun buruh *outsourcing*, bahkan tidak menutup kemungkinan juga dilakukan wawancara pada beberapa instansi-instansi terkait agar didapat informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.6.2.2 Data Sekunder

Menurut pendapat Umar, (1999:hlm43), Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung berhubungan dengan informan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data ini diperoleh dari berbagai referensi-referensi data mengenai perlawanan yang di dapat melalui buku, *browsing* internet, literatur skripsi yang berhubungan dengan tema skripsi.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

1.6.3.1 Wawancara

Menurut Yunus, (2010:hlm358) Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian .

Teknik wawancara yang di gunakan yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara

Tanya jawab secara bebas sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan kehidupan informan dengan pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup. (Mudjia Rahardjo, 2011). Alat yang akan digunakan selama proses wawancara adalah alat rekam hand phone. Pertimbangan dipilihnya hand phone sebagai alat rekam wawancara, karena selain praktis, juga menghindari kekakuan dan kesan terlalu formal pada diri informan. Metode ini dilakukan terhadap informan dan pekerja atau buruh perusahaan Interbat tersebut setelah melalui proses observasi di atas.

1.6.3.2 Pengamatan (Observasi)

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian menurut Bungin. (2007:hlm115-117).

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Pada tanggal 1 Mei di peringati sebagai hari buruh, oleh karena itu peneliti mengamati perkembangan yang terjadi dilapangan, proses perlawanan dan bentuk-bentuk

perlawanan seperti apa yang dilakukan oleh serikat buruh. Peneliti melakukan pengamatan 1 hari yaitu hari Rabu tanggal 1 Mei 2013. Dalam pengamatan ini peneliti tidak mendapatkan hasil yang diinginkan serikat buruh dalam tuntutan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK). Serikat buruh menginginkan gubernur merekomendasi surat keputusan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) padahal bupati sudah menandatangani surat keputusan tersebut. Tetapi Kabupaten Pasuruan saja yang sudah direkomendasi surat tuntutan Upah Minimum Sektoral Kota oleh Gubernur.

1.6.3.3 Catatan Lapangan

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, (2005: hlm153), mengemukakan bahwa catatan lapangan merupakan catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Informan penelitian tidak dibatasi hanya memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, namun informan penelitian telah diberikan kebebasan untuk mengekspresikan jawabannya. Semua informasi yang didapat di lapangan dicatat kedalam catatan lapangan secara cermat pada hari yang sama dengan kegiatan wawancara, dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan terlupakan atau tumpang tindih informasi antara subyek penelitian yang satu dengan yang lain.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong, (2007: hlm103) Teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan

satuan uraian dasar, membedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Setelah proses observasi, wawancara dengan pertanyaan yang di buat maka peneliti melakukan penyeleksian terhadap data yang di peroleh yang kemudian akan di jadikan sebuah hasil penelitian. Dalam melakukan penyeleksian terhadap data akan diolah melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses pengklasifikasian untuk mencari persamaan dan perbedaan kategori atau variasi yang ada, guna memperoleh data yang lebih signifikan. Dalam langkah pertama akan ditentukan tema-tema dari ide mengenai proses dan bentuk perlawanan serikat buruh terhadap hubungan industrial di PT INTERBAT Farmasi kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Tahap kedua adalah proses menghubungkan hasil-hasil klasifikasi tersebut dengan referensi-referensi atau teori yang berlaku atau berhubungan.

1.6.5 Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut Untuk menjamin kredibilitas data dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan analisa dan interpretasi terhadap data, peneliti menggunakan strategi triangulasi (*triangulation strategy*). Strategi ini adalah suatu strategi multi metode (*multi-method*), multi-model (*multi-trait*) dan multi-referensi (*multi-reference*). melihat ketepatan posisi obyek penelitian dan multi persepsi (*multi-perceive*) untuk mengklasifikasi maksud dan melakukan deskripsi atau interpretasi data.

Adapun strategi triangulasi yang digunakan adalah punya Denzin (dalam Moleong, 1995), yakni Triangulasi: 1) Triangulasi dengan sumber, 2) Triangulasi dengan metode, 3) Triangulasi dengan penyidik, 4) Triangulasi dengan teori. Adapun jenis triangulasi yang dipilih untuk digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah triangulasi dengan sumber.

Menurut Moleong, (2000:hlm178) Pada strategi triangulasi sumber (*triangulation of sources*), data-data penelitian yang diperoleh peneliti, dibandingkan dan dicek derajat kredibilitas atau kepercayaanya melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam metode kualitatif ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengecek dan membandingkan data yang diperoleh, cara-cara tersebut sebagai berikut: *Pertama*, peneliti membandingkan antara hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara. *Kedua*, peneliti membandingkan pendapat yang dikatakan informan di depan umum dengan pendapat yang dikatakan secara pribadi. *Ketiga*, peneliti membandingkan keadaan dari perspektif sumber informasi (*informant*) dengan berbagai pendapat dan pandangan orang

lain. *Keempat*, membandingkan antara data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. Melalui Triangulasi ini bisa menjadi bukti yang akurat terhadap hasil yang dilakukan peneliti terhadap aspek dan bentuk yang dilakukan serikat buruh/pekerja di PT Interbat desa banjarkemantren Kabupaten Sidoarjo.

1.6.6 Metode Pemilihan Informan

Menurut Moleong, (2006:hlm132) Informan merupakan orang yang menjadi sumber informasi bagi penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Buruh tetap yang terlibat dalam penelitian
2. Buruh tetap yang tidak terlibat dalam penelitian
3. Buruh kontrak yang terlibat dalam penelitian
4. Buruh kontrak yang tidak terlibat dalam penelitian
5. Buruh outsourcing yang tidak terlibat dalam penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Informan penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti: informan kunci (*key informant*), informan utama, dan informan tambahan menurut Sugiyono, 2007:hlm171-172 .

Informan utama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian dari pihak serikat buruh. Informan tambahan adalah orang-orang yang

dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam penelitian. Alasan kenapa peneliti memilih mereka sebagai informan dalam penelitian ini karena terdapat pertimbangan atau kriteria. Pertama, merujuk pada permasalahan yang diajukan mengenai aspek dan bentuk perlawanan serikat pekerja atau buruh terhadap hubungan industrial di PT Interbat kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kedua, Informan memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Perusahaan Interbat Jl. H.R. Moch. Mangundiprojo No. 1, Kabupaten Buduran, Kecamatan Sidoarjo. Perusahaan Interbat merupakan perusahaan farmasi yang memproduksi berbagai obat. Alasan kenapa peneliti mengambil lokasi penelitian karena terdapat pertimbangan atau kriteria tertentu dari lokasi tersebut, pertama merujuk pada rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan serikat pekerja atau buruh, kedua, peneliti sudah cukup lama bertempat tinggal dekat dengan lokasi penelitian sehingga peneliti bisa mengamati aspek apa yang menyebabkan buruh melakukan bentuk-bentuk perlawanan. Pengetahuan seperti yang diatas cukup penting untuk memperlancar proses penelitian secara intensif dan peneliti dapat mendalami masalah yang sedang terjadi.

1.6.7.2 Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Februari 2013. Pada waktu tersebut peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan para

subyek penelitian. Alasan kenapa peneliti mengambil lokasi penelitian di atas karena terdapat pertimbangan atau kriteria tertentu dari lokasi ini. Pertama, merujuk pada rumusan masalah mengenai aspek dan bentuk perlawanan serikat pekerja atau buruh terhadap hubungan industrial, sehingga pemilihan lokasi ini telah sesuai kriteria. Kedua observasi penelitian telah dilakukan peneliti semenjak pengajuan judul disetujui untuk dibuat proposal skripsi.

1.6.8 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2

No	Kegiatan	Februari	Maret - Mei	Juni - Juli	Agustus - Desember	Januari
1.	Tahap Persiapan	√				
2.	Pengamatan dan pengumpulan data		√			
3.	Penulisan Laporan			√		
4.	Revisi				√	
5.	Pengumpulan Laporan					√

